

**ANALISIS OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI
WILAYAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

SILVIA OKTAVIANI

NIM: 15280/2009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI WILAYAH KOTA PADANG

Nama : Silvia Oktaviani
NIM/BP : 15280/2009
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

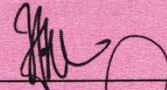
**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, April 2013

**Tim Penguji,
Nama**

Tanda Tangan

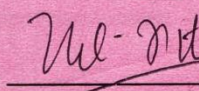
1. Ketua : Herlina Helmy, SE, M.S.Ak

1. 

2. Anggota : Deviani, SE, M.Si, Ak

2. 

3. Anggota : Nelvirita, SE, M.Si, Ak

3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

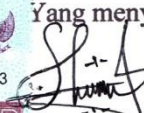
Nama : SILVIA OKTAVIANI
Tahun Masuk/NIM : 2009/15280
Tempat/Tgl.Lahir : Lubuk Sikaping/10 Oktober 1988
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : JL. Patenggangan No 7b
Judul Tugas Akhir : ANALISIS OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DI WILAYAH KOTA PADANG

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, April 2013

Yang menyatakan,

Silvia Oktaviani
NIM. 15280



ABSTRAK

Silvia Oktaviani, 2009/15280 : “Analisis Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Padang”.

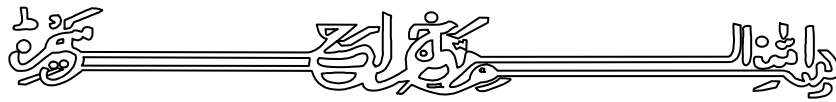
Pembimbing : Herlina Helmy, SE, M. SAK

Retribusi Parkir merupakan salah satu dari sekian Retribusi yang ada di Wilayah Kota Padang dimana keberadaanya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah. Namun dalam realisasinya, keberadaan Retribusi Parkir ini justru sangat memprihatinkan dimana nilai dan pertumbuhannya dari tahun 2007 s/d 2011 relatif mengalami penurunan.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi yang bertujuan untuk meneliti optimalisasi pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Padang dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan terget yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang menurut Peraturan dan Undang-Undang mempunyai fungsi dalam mengelola pajak daerah khususnya Retribusi Parkir dengan tahun penelitian mulai tahun 2007 s/d 2011.

Berdasarkan pengolahan data, hasil optimalisasi pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Padang pada tahun 2007 adalah 79%, tahun 2008 sebesar 111%, tahun 2009 sebesar 44%, tahun 2010 sebesar 36% dan tahun 2011 sebesar 37%. Dari data yang diperoleh pada lima tahun terakhir (2007 s/d 2011), tahun 2008 merupakan tahun yang memiliki tingkat optimalisasi yang tinggi/optimal.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Padang”. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, semangat, dorongan, maupun doa dan kasih sayang kepada peneliti selama proses penyusunan tugas akhir ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuniar Wardi, Drs, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Si, Ak, selaku Pembimbing Akademik peneliti, yang telah memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S, Ak, selaku Pembimbing tugas akhir peneliti, yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak dan Ibu Eka Fauzihardhani, SE, M.Si, Ak, selaku dosen penguji peneliti.
7. Bapak/Ibu dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan selama perkuliahan kepada peneliti.
8. Kepala DPKA Kota Padang, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Padang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Teristimewa peneliti ucapkan kepada kedua orangtua, saudara dan teman-teman penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu, demi kesempurnaan tugas akhir ini peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Padang, Maret 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang...	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Retribusi	8
1. Definisi Retribusi	8
2. Perbedaan Pajak dengan Retribusi.....	9
B. Retribusi Daerah.....	11
C. Pengertian Retribusi Parkir.....	15
D. Strategi Peningkatan Retribusi	17
E. Objek dan Subjek Retribusi Parkir.	19
F. Pemungutan Retribusi Parkir.	20
G. Konsep Optimalisasi	21
H. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	24
C. Rancangan Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Tahapan Penelitian.....	24

D. Objek Penelitian	25
E. Sumber Data	26
F. Teknik Analisis	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
A. Profil Instansi	27
1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.....	27
a. Sejarah Singkat Pembentukan Dinas.	27
b. Visi dan Misi.....	27
c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.....	28
2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.	37
a. Sejarah Singkat Pembentukan Dinas.	37
b. Visi dan Misi.....	37
c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas.....	38
B. Kebijakan Dalam Menetapkan Target Retribusi Parkir Kota Padang.....	39
C. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir.	39
D. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir.	44
E. Usaha Dinas Perhubungan Dalam Mengoptimalkan Retribusi.....	49
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2007 s/d 2011	5
Tabel 2	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	42
Tabel 3	Optimalisasi Retribusi Parkir Kota Padang Tahun 2007 s/d 2011	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir.....	40
----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Retribusi Parkir Tahun 2007 s/d 2011
2. Surat Permohonan Observasi
3. Surat Rekomendasi Observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Otonomi daerah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia sejak 6 tahun yang lalu merupakan salah satu tuntunan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk dalam meningkatkan sektor pendapatan asli daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah, Undang-Undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan hakekatnya ekonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pajak dan Retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini, penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat yaitu dengan Undang-Undang khususnya Undang-Undang tentang pemerintah daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan

kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaran pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam konsep ideal seharusnya

merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah Retribusi Parkir.

Retribusi Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Padang. Setiap jenis pajak dan Retribusi Daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pertumbuhan dan perkembangan Pemungutan Retribusi Parkir Kota Padang, maka dapat dilihat dari target dan realisasi Retribusi Parkir selama 5 tahun terakhir, yakni dari tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Target dan Realisasi Retribusi Parkir
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
Tahun 2007 s/d 2011

Tahun/Pajak	Retribusi Parkir	
	Target	Realisasi
Tahun 2007	1.400.000.000	1.065.790.500
Tahun 2008	1.034.474.500	1.146.899.500
Tahun 2009	2.759.681.632	1.208.958.000
Tahun 2010	2.731.884.632	979.621.500
Tahun 2011	3.183.629.020	1.163.550.000

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang, 2012

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan target dan realisasi Retribusi Parkir Kota Padang dari tahun 2007-2011 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kota Padang. Berawal dari keadaan tersebut, maka diadakan suatu penelitian untuk mengukur optimalisasi pemungutan Retribusi Parkir Kota Padang. Untuk itu, peneliti mengangkat judul “Analisis Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana menetapkan Target Retribusi Parkir Kota Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Kota Padang?
3. Apakah penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang telah optimal tahun 2009-2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara menetapkan Target Retribusi Parkir Kota Padang.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Kota Padang.
3. Untuk mengetahui apakah penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang telah optimal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat penting atau berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintahan daerah Kota Padang pada khususnya. Penelitian ini di harapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Sebagai upaya untuk memperkaya hasil penelitian tentang Optimalisasi Retribusi Parkir dan sarana berlatih untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta mendalami teori yang berkaitan dengan Retribusi Parkir.

2. Bagi Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Padang khususnya gambaran mengenai Retribusi Parkir.

3. Pihak lain

Memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai Retribusi Parkir.

Dapat digunakan sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan tentang Retribusi Parkir.